



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Tegal Tahun 2021



Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Jln. Dr. Soetomo No. 1C Slawi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2021. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2021 bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

Demikian Renja ini kami susun. Semoga Dinas Kesehatan dapat mencapai target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Slawi, Juni 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal



dr. Hendadi Setiaji, M.Kes
NIP. 19630530 198911 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.....	8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	8

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	9
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	13
3.3 Program dan Kegiatan.....	14

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

.....	15
-------	----

BAB V. PENUTUP	35
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya kesehatan, 4) Sediaan farmasi, 5) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Upaya pembangunan harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Orientasi Pembangunan Kesehatan yang semula sangat menekankan upaya kuratif dan rehabilitatif, secara bertahap diubah menjadi upaya kesehatan yang berintegrasi menuju kawasan sehat dengan peran aktif masyarakat. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pemahaman baru terhadap konsep atau definisi kesehatan dan meningkatnya kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan keyakinan bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat menciptakan Indonesia Sehat.

Pembangunan kesehatan kemudian diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberi prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Sehingga keberhasilan pembangunan kesehatan yaitu dengan semakin meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai dengan sikap dan perilaku makin kritisnya masyarakat menanggapi perkembangan pembangunan dibidang kesehatan. Demikian

pula dengan tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau secara merata.

Paradigma baru bidang kesehatan tersebut telah menuntun arah pergeseran kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan, menyediakan, melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan secara paripurna, dengan sasaran upaya menciptakan dan mengembangkan pelayanan prima. Secara mikro, paradigma sehat berarti bahwa pembangunan kesehatan lebih menekankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Kabupaten Tegal Sehat adalah gambaran masyarakat Kabupaten Tegal dimasa depan, yang penduduknya: hidup dalam lingkungan Sehat, mempunyai perilaku/budaya sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Faktor perilaku bersama lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan, oleh karena itu perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh.

Perilaku sehat yang diharapkan adalah perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan. Sedangkan lingkungan sehat adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu lingkungan yang bebas polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dalam memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2006 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap unit kerja dianjurkan untuk membuat Perencanaan Kinerja untuk tahun tertentu dalam rangka mempermudah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada akhir tahun anggaran.

Perencanaan Kerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu memuat keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Rencana Kerja (*Performance Plan*) adalah dokumen perencanaan yang berisikan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 ini didasarkan pada perubahan paradigma pembangunan kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2020 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang - Undang 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- b. Undang - Undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- c. Undang - Undang 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
- d. Undang - Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- e. Undang - Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang - Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- g. Undang - Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- h. Undang - Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- i. Undang – Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- j. Undang - Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Loembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
- k. Undang - Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

- l. Undang - Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- m. Undang - Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- n. Undang - Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 — 2025
- o. Undang - Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- p. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
- q. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- t. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- u. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah
- v. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- w. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025
- x. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
- y. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024
- z. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
- aa. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja – OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang

berjangka waktu 1 (satu) tahun. Renja-OPD ini memuat seluruh Kebijakan, Program dan atau Kegiatan, yang disusun dan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang menjadi kewenangannya, untuk mencapai sasaran-sasaran/ visi dan misi yang telah ditetapkan sekaligus dengan perincian dana yang dibutuhkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2021 dengan maksud :

- a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

- a. Sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
- b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal pada tahun yang bersangkutan;
- c. Sebagai operasionalisasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2024 dalam rangka meningkatkan kinerja dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2021 ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang tercantum pada Rencana Strategis dinas melalui program dan kegiatan. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran. Dari evaluasi tahun lalu diharapkan dapat diketahui hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal pada tahun 2019 yang terdiri dari 20 (dua puluh) program dengan 133 (seratus tiga puluh tiga) kegiatan yang telah terlaksana dengan realisasi 100 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Pencapaian kinerja yang baik atau sesuai dengan target akan membantu proses percepatan terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sehat dilandasi Semangat Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dilakukan berbagai upaya pembangunan kesehatan dengan indikator kinerja pencapaian pembangunan kesehatan, yaitu indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

2.3.1 Analisis isu-isu strategis dari lingkungan eksternal

- Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel
- Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2019 peringkat 32 se provinsi Jawa Tengah.

- Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
- Kewenangan wajib bidang kesehatan (PP no.38/2007)

2.3.2 Analisis Isu –isu strategis dari lingkungan internal

- Derajat kesehatan telah meningkat, namun disparitasnya masih tinggi.
- Beban ganda dalam pembangunan kesehatan.
- Pemberdayaan masyarakat masih terbatas.
- Lingkungan strategis kurang mendukung
- Pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas belum optimal
- Sistem perencanaan dan penganggaran masih belum optimal.
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)
- Peningkatan pembiayaan kesehatan melalui jamkesmasda (sesuai UU SJSN no.40 thn 2004)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Rancangan awal RKPD merupakan rancangan awal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun kedepan, pada rancangan awal RKPD ini masih mengacu pada program/kegiatan tahun sebelumnya karena merupakan program/kegiatan rutin yang dilaksanakan terus menerus.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kesehatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mendasari usulan dari masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, berdasarkan potensi yang ada di daerah, prioritas yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal pada tahun 2021, telah menyusun usulan program dan kegiatan yang merupakan rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari semua bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal baik yang bersumber dana APBD II, maupun APBN. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021 dengan sumber dana APBD II dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 3, Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Namun demikian, pembangunan kesehatan yang dilaksanakan masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi, yaitu sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Masih adanya masyarakat yang belum mau di imunisasi
- Belum optimalnya peran lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Belum maksimalnya surveilans epidemiologi Penyakit Tidak Menular
- Cakupan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) pengobatan ARV masih rendah dikarenakan : banyak ODHA yang belum sadar untuk pengobatan ARV (Antiretroviral), ODHA *loss follow up* (menghentikan pengobatan ARV), masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA , ODHA belum berani open status pada keluarga.
- Belum optimalnya peran lintas sector terkait dan masyarakat dalam penemuan kasus baru kusta
- Masih ada stigma dan diskriminasi kusta di masyarakat
- Belum optimalnya peran organisasi profesi kesehatan, dokter praktik mandiri dan klinik terhadap program pencegahan dan penanggulangan TB (Tuberculosis)
- Belum optimalnya peran serta masyarakat /organisasi masyarakat dalam program pencegahan dan penanggulangan TB
- Belum membudayanya melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD di masyarakat

- *Fogging minded* dalam pencegahan dan penanggulangan DBD masih tinggi baik di masyarakat .
2. Pelayanan Kesehatan
- Belum optimalnya program promotif dan preventif di tingkat puskesmas
 - Masih perlu ditingkatkannya mutu pelayanan di fasyankes
3. Kesehatan Masyarakat
- Masih lemahnya dukungan regulasi/penegakan aturan untuk mendukung perilaku stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan
 - Kurangnya frekuensi dan alokasi anggaran pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk memberi kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya stop BAB sembarangan
 - Pemenuhan sarana sanitasi jamban sehat kurang merata dan kurang tepat sasaran karena belum dilakukannya pemutakhiran data kemiskinan berdasarkan basis data terpadu
 - Penentuan klasifikasi Tempat Fasilitas Umum (TFU) kurang jelas sehingga obyek TFU sebagai sasaran terlalu banyak
 - Kurangnya dukungan dan peran aktif OPD terkait berdasarkan tupoksi dalam pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
 - Kurangnya kesadaran pemilik/penanggung jawab TPM untuk mengurus sertifikat laik sehat
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung program kesehatan kerja dan olahraga
 - Masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - Fungsi promotif dan preventif yang belum menjadi prioritas
 - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
 - Belum tercapainya *Universal Health Covarage* (UHC)
4. Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Adanya mobilitas penduduk sehingga pemantauan ibu hamil kurang optimal
 - Masih adanya ibu hamil beresiko tinggi dengan status ekonomi kurang mampu
 - Masih adanya ibu hamil beresiko tinggi belum memiliki administrasi kependudukan
 - kurangnya kualitas tatalaksana kegawatdarutan neonatus (kualitas SDM berdampak pada kualitas pelayanan)
 - Belum optimalnya pelayanan kesehatan remaja sehingga kasus pada remaja meningkat
 - Masih adanya kasus balita stunting, yaitu 5,33% pada tahun 2018

- Masih adanya kasus gizi buruk dengan penyakit penyerta yang kronis
- Belum optimalnya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan gizi buruk dan stunting
- Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan
- Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan yang kurang optimal
- Manajemen pengelolaan SDM Kesehatan yang masih kurang optimal
- Status legalitas tenaga kesehatan yang masih kurang mendapat perhatian oleh sebagian tenaga kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Sosialisasi tentang imunisasi pada masyarakat
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit tidak menular seperti hipertensi, Diabetes Mellitus, obesitas, dan lain – lain
- Pendampingan ODHA
- Penguatan jejaring layanan TB antara pemerintah dan swasta dengan membentuk PPM (Public Privat Mix) TB
- Pembentukan koalisi organisasi profesi dalam penanggulangan TB
- Sistem rujukan sampel TB untuk pemeriksaan tes cepat molekuler
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang HIV, AIDS, kusta, TB, DBD, dan penyakit menular lainnya
- Pendekatan keluarga yaitu gerakan 1 rumah 1 jumatik prioritas di desa endemis DBD yang melibatkan SBH (Saka Bhakti Husada), Kader dan pemerintah Desa (Alokasi Dana Desa)
- Peningkatan peran lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian penyakit
- Penguatan kapasitas petugas kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit

2. Pelayanan Kesehatan

- Penempatan promotif dan preventif sebagai prioritas program di puskesmas
- Peningkatan mutu pelayanan puskesmas melalui akreditasi puskesmas
- Optimalisasi Sistem Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas

3. Kesehatan Masyarakat

- Advokasi pada pemangku kebijakan dalam rangka peningkatan anggaran STBM
 - Kerja sama lintas sector (pemerintah desa, kecamatan, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, tokoh agama) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan lingkungan, jambanisasi, peningkatan PHBS
 - Peningkatan jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat
4. Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Kerja sama dengan Dinas Kependudukan dalam pemenuhan administrasi kependudukan ibu hamil
 - Optimalisasi kerja sama lintas sektor (Dinas Pertanian, Dinas DP3A2KB, Dinas Sosial, organisasi sosial masyarakat, dll) dalam mengatasi balita stunting
 - Pelatihan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir
 - Optimalisasi Sistem Informasi dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan yang kurang optimal
 - Optimalisasi Sistem Informasi dalam pemetaan SDM Kesehatan
 - Pemberlakuan *Reward dan Punishment*

Berdasarkan permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan dalam pembangunan kesehatan seperti diuraikan di atas, maka Dinas Kesehatan melakukan upaya pembangunan kesehatan dengan memprioritaskan program-program sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kegiatan pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit antara lain Kegiatan Surveillance dan Imunisasi, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

2. Pelayanan Kesehatan

Kegiatan pada Program Pelayanan Kesehatan antara lain Kegiatan Pelayanan kesehatan dasar, tradisional, dan rujukan, Kegiatan Pelayanan Kegawatandaruratan Terpadu dan PPPK, Kegiatan Akreditasi Puskesmas, Kegiatan Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Perijinan Kesehatan, Standarisasi Alat medis di Puskesmas, Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK), Kegiatan Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan Obat Gizi, Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK), Kegiatan Laboratorium Kesehatan, Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial, Pengadaan simplisia dan herbal terstandarisasi,

Kegiatan Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) Kalibakung, Operasional Puskesmas BLUD, Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Puskesmas.

3. Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pada Program Kesehatan Masyarakat antara lain Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Pembiayaan Kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Pengadaan IPAL, dan Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja, dan Olahraga.

4. Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan pada program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Kesehatan Manusia antara lain Kegiatan Kesehatan Keluarga, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat, Kegiatan Operasional Penguatan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kegiatan pada program ini antara lain Perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja, Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Kantor, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

3.2.1 Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai adalah suatu keadaan masa depan masyarakat kabupaten Tegal yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, baik jasmani, rohani maupun sosial, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagai dinas teknis yang mengelola kesehatan dituntut perannya dalam pengelolaan dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan keadaan:

- a. Terciptanya kondisi pelayanan kesehatan secara prima.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta membudayakan hidup bersih dan sehat.
- c. Semakin meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas terutama pada keluarga miskin dan rentan social.
- d. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah keluarga yang mempunyai derajat kesehatan yang semakin tinggi.

- e. Semakin meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas terutama pada keluarga miskin dan rentan sosial.
- f. Semakin banyaknya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
- g. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang bermutu dan merata.
- h. Terselenggaranya upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat yang komprehensif.
- i. Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- j. Terselenggaranya upaya kesehatan lingkungan dan upaya promosi kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- k. Terselenggaranya upaya manajemen kesehatan dan sistem informasi kesehatan di setiap jenjang administrasi pelayanan kesehatan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
- b. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB).
- c. Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA)
- d. Meningkatnya cakupan desa STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat)

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh OPD guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran tujuan sesuai dengan program yang telah ditentukan.

Rencana capaian program merupakan dasar kebijakan dalam suatu OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang perwujudan operasionalnya adalah ke dalam suatu Prioritas Kegiatan. Hal ini adalah untuk meminimalisir atau mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan sebuah Program (Kegiatan), dalam rangka meningkatkan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga pencapaian sasaran bisa lebih baik dan lebih terukur. Program dan kegiatan beserta anggaran Dinas Kesehatan tahun 2020 selengkapnya terdapat pada lampiran.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					7.918.727.460	
X	XX	01	2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
X	XX	01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	200.000.000		
								Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen			
								Jumlah laporan SPIP	1 laporan			
								Jumlah laporan LKjIP	1 laporan			
								Jumlah Profil Kesehatan	30 buku			
								Jumlah Buku Saku Kesehatan	30 buku			
								Jumlah Laporan DHA	1 laporan			
								Pelaksanaan Rakerkesda	1 kali			
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan					

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
X	XX	01	2.02	06				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan CALK	1 laporan	516.684.160	
									Jumlah laporan Neraca	1 laporan		
									Jumlah laporan LRA	1 laporan		
									Jumlah dokumen RKA dan DPA	1 dokumen		
									Puskesmas Kapitasi Rendah		2.000.000.000	
X	XX	01	2.03				Administrasi Umum					
X	XX	01	2.03	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Telekomunikasi, SyMBER Daya Air dan Listrik	1 paket	875.043.300	
X	XX	01	2.03	18				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1 paket	275.000.000	
									Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1 paket		
X	XX	01	2.03	24				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 paket	175.000.000	

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
									Jumlah mobil operasional Dinas Kesehatan	0 unit		
									Jumlah pengadaan sarana transportasi puskesmas keliling dan ambulance	2 unit	600.000.000	DAK
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kapitasi Rendah		2.000.000.000	
X	XX	01	2.03	34				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	25 paket	900.000.000	
									Jumlah Pengadaan Meubeler dan Perlengkapan Kantor untuk Puskesmas Pembantu (Pustu)	Jatiwangi RT 06 RW 03	100.000.000	
									Pengadaan Meubeler dan Perlengkapan Kantor untuk Puskesmas Pembantu (Pustu)	Desa Cenggini	100.000.000	
									Mebeler Puskesmas Tarub		50.000.000	POKIR
									Mebeler Puskesmas Penusupan		50.000.000	POKIR
X	XX	01	2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
X	XX	01	2.04	09				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 paket	77.000.000	
1	02	02						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			120.053.546.540	
1	02	02	2.01					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				
1	02	02	2.01	01				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				
1	02	02	2.01	02				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Puskesmas	Puskesmas Penusupan	1.000.000.000	DAK
									Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Puskesmas	Puskesmas Kramat	3.000.000.000	DBHCHT
									Pembangunan Pustu Sokasari		150.000.000	POKIR
1	02	02	2.01	03				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
1	02	02	2.01	04				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				
1	02	02	2.01	05				Pengembangan Rumah Sakit				
1	02	02	2.01	06				Pengembangan Puskesmas				
1	02	02	2.01	07				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
1	02	02	2.01	08				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				
1	02	02	2.01	09				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi Puskesmas Kambangan	1 paket	4.500.000.000	
									Penataan Lingkungan Puskesmas Pembantu Timbagraja	1 paket	100.000.000	POKIR
									Penataan Lingkungan Puskesmas Bangun Galih	1 paket	200.000.000	POKIR
									Penataan Lingkungan Puskesmas Kramat	1 paket	200.000.000	POKIR
									Penataan Lingkungan Puskesmas Bumijawa	1 paket	100.000.000	POKIR

KODE	NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
	U	P	K	SK				
					Penataan Lingkungan Puskesmas Penusupan	1 paket	200.000.000	POKIR
					Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) & rumah dinas medis/paramedis Puskesmas Adiwerna	1 paket	200.000.000	
					Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) & rumah dinas medis/paramedis Desa Tamansari RT 23 / RW 05	1 paket	200.000.000	
					Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) & rumah dinas medis/paramedis Dukuhdamu	1 paket	200.000.000	
					Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) & rumah dinas medis/paramedis Desa Karangdawa	1 paket	200.000.000	
					Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) & rumah dinas medis/paramedis Getaskerep	1 paket	30.000.000	
					Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) & rumah dinas medis/paramedis Desa Wringinjenggot	1 paket	100.000.000	

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
									Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) & rumah dinas medis/paramedis Desa Sidakaton RT 01 RW 06	1 paket	200.000.000	
1	02	02	2.01	13				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pembangunan IPAL	2	600.000.000	DAK
1	02	02	2.01	14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas	1 paket	2.000.000.000	
									Jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	1 paket	70.000.000	
									Jumlah Pengadaan Cartridge TCM (DAK)	1 paket	1.347.705.000	DAK
									Jumlah Pengadaan alat TCM (Pajak Rokok)	1 paket	408.180.000	Pajak Rokok

KODE	NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
	U	P	K	SK				
					Pengadaan alkes pemantauan gizi masyarakat berupa antropometri, kit SDIDTK (Deteksi intervensi Dini Tumbuh kembang) KIT Remaja kit dll untuk pustu Desa Kabunan		20.000.000	
					Pengadaan alkes pemantauan gizi masyarakat berupa antropometri, kit SDIDTK (Deteksi intervensi Dini Tumbuh kembang) KIT Remaja kit dll untuk pustu Desa Penyalahan		20.000.000	
					Pengadaan alkes pemantauan gizi masyarakat berupa antropometri, kit SDIDTK (Deteksi intervensi Dini Tumbuh kembang) KIT Remaja kit dll untuk pustu Dukuh Kemantran Desa Jembayat		20.000.000	
					Pengadaan alkes pemantauan gizi masyarakat berupa antropometri, kit SDIDTK (Deteksi intervensi Dini Tumbuh kembang) KIT Remaja kit dll untuk pustu		20.000.000	

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
									Desa Pesarean			
									Pengadaan alkes pemantauan gizi masyarakat berupa antropometri, kit SDIDTK (Deteksi intervensi Dini Tumbuh kembang) KIT Remaja kit dll untuk pustu Desa Karangmulya		20.000.000	
									Pengadaan alkes pemantauan gizi masyarakat berupa antropometri, kit SDIDTK (Deteksi intervensi Dini Tumbuh kembang) KIT Remaja kit dll untuk pustu Pasangan		20.000.000	
1	02	02	2.01	15				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah standarisasi alat medis di puskesmas	1 paket	40.000.000	

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
1	02	02	2.01	16			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah dan jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	29 paket	6.000.000.000	DAK	
								Jumlah dan jenis Obat untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Obat Gizi di Puskesmas	29 paket	586.000.000		
1	02	02	2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	02	02	2.02	01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	29.352	594.000.000		
1	02	02	2.02	02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	27.457	3.563.785.000	(Dak Non Fisik)	
1	02	02	2.02	03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
1	02	02	2.02	04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita stunting	22.224	530.000.000	
									Jumlah balita stunting	22.224	1.499.999.000	DAK
1	02	02	2.02	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Pengadaan BHP Penganggulangan TBC (DAK)	1 paket	233.220.000	DAK
1	02	02	2.02	12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Pengadaan BHP HIV dan Sifilis (DAK)	1 paket	1.525.675.000	DAK
1	02	02	2.02	19				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				
									Jumlah Pengadaan simplisia dan herbal terstandarisasi	1 paket	100.000.000	

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
									Rata-rata Jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung per bulan	250 orang	630.000.000	
1	02	02	2.02	20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah desa uci	287	280.000.000	
1	02	02	2.02	22				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah usia produktif yang dilakukan skrining kesehatan	393.974	190.000.000	
1	02	02	2.02	23				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rata-rata jumlah kasus kegawatdaruratan yang ditangani oleh Tim PSC 119 per bulan	500 orang	1.000.000.000	
									Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar	29	1.250.000.000	
									Jumlah RS yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan	8		
									Jumlah Sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional	1		
									Jumlah Pembayaran klaim jasa pelayanan program puskesmas gratis	29 puskesmas		

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
1	02	02	2.02	25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah orang terduga Tuberculosis (TB) yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standart	14.407	380.000.000	
1	02	02	2.02	28				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah sample yang diperiksa sesuai standar	897 sampel	80.000.000	
1	02	02	2.02	33				Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase capaian kinerja mutu puskesmas	29 Pusk	85.000.000.000	BLUD
1	02	02	2.02	34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
1	02	02	2.02	35				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas terakreditasi	29	844.175.000	DAK
1	02	02	2.04					Penerbitan Izin				

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
						Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota						
1	02	02	2.04	03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasyankes Lainnya yang terakreditasi	100%	180.000.000		
								Jumlah puskesmas yg melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart	20 puskesmas	420.807.540		
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				140.000.000	-	
1	02	03	2.01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota						

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
1	02	03	2.01	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah pelayanan rekomendasi perijinan di bidang kesehatan	450 perijinan	40.000.000		
1	02	03	2.04				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	02	03	2.04	01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan 9 tenaga strategis	20	100.000.000		
1	02	04					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			593.615.000		
1	02	04	2.01				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan					

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
							Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
1	02	04	2.01	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pengawasan Obat dan Makanan	1 paket	263.615.000	DAK	
1	02	04	2.04				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
1	02	04	2.04	01				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	397	330.000.000	
1	02	05						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			48.965.833.000	
1	02	05	2.01					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
1	02	05	2.01	01				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) atau Proposi rumah tangga sehat	286.053	320.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Balapulang Wetan		100.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Gumayun.		104.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Dukuhbangsa		40.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Lebakwangi RW 01, 02, 03		54.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa rajegwesi		106.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Kertaharja		40.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Pecabean		86.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Dukuhsalam		20.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Kagok		30.000.000	

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
									Pengadaan jamban sehat Pakembaran		10.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Karangwuluh		30.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Gembongdadi		20.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Kertasari		20.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Jatimulya		80.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Jatibogor		100.000.000	
									Pengadaan Jamban Sehat Desa Bojongsana		52.000.000	
1	02	05	2.02				Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
1	02	05	2.02	01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Jumlah puskesmas melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	29 Puskesmas	22.653.833.000	BOK (DAK Non Fisik)	

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
								Bersih dan Sehat				
1	02	05	2.03					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	02	05	2.03	01				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Pembayaran premi peserta PBI JKN Kab. Tegal	70.580 peserta	25.000.000.000	(Pajak Rokok)
									Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	1.446.676 jiwa	100.000.000	
								TOTAL PAGU INDIKATIF			177.671.722.000	-

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ini disusun berdasarkan kebijakan yang selanjutnya dibuat program yang berjumlah 5 program dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang berjumlah 45 kegiatan dilakukan selama Tahun 2021. Program-program tersebut menjadi kebutuhan mendesak terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tegal. Namun demikian, di sisi lain terdapat keterbatasan potensi, dana, kualitas sumber daya manusia dan kemampuan manajerial dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 2021 disusun sebagai bahan/kerangka acuan dan pedoman bagi perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tegal tahun 2021.

Harapan kami Renja ini bukan hanya merupakan dokumen administrasi belaka, namun juga merupakan wujud pelaksanaan pelayanan masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Tegal di Bidang Kesehatan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun 2021 dapat berjalan dengan lebih baik dalam mengembangkan pembangunan bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Demikianlah Rencana Kerja kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.